

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kata demokrasi merupakan berasal dari Bahasa Yunani, dimana terdapat kata “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* sendiri memiliki makna sebagai rakyat, sedangkan *Kratos* memiliki makna sebagai kuasa.¹ Maka dari itu, demokrasi dapat di artikan sebagai rakyat lah yang memiliki kekuasaan sepenuhnya. Kemudian terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh UNESCO mengenai Demokrasi pada tahun 1949, dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa demokrasi merupakan nama yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi politik serta social.²

Pada historisnya gagasan demokrasi tentu berasal dari Yunani, gagasan tersebut hadir dikarenakan dalam sebuah pengambilan keputusan yang memiliki kaitan dengan jalannya negara tentu harus melibatkan rakyat. Maka dari itu, seluruh problematika yang berkaitan dengan kenegaraan rakyat harus diikuti sertakan. Sementara itu, menurut C.F. Strong demokrasi merupakan system pemerintah yang dimana mayoritas rakyat telah berumur dewasa dapat ikut serta dalam politik atas dasar system perwakilan yang kemudian mampu dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

Demokrasi merupakan sebuah upaya untuk memberikan ruang terhadap rakyat dalam menentukan jalannya sebuah negara. Kemudian terdapat ciri-ciri demokrasi, yang dimana sebagai berikut:

1. Memiliki Perwakilan Rakyat

¹ Miriam Budiardjo, “Konsep Mengenai Demokrasi” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 105

² S.I. Benn dan R.S. Peters, “Principles of Political Thought (New York: Collier Books, 1964) Hal. 393

2. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara
3. Menerapkan Ciri Konstitusional
4. Menyelenggarakan Pemilihan Umum
5. Terdapat Sistem Partai

Tidak hanya ciri saja yang dimiliki oleh demokrasi, tetapi demokrasi juga memiliki tujuan. Pada tujuan demokrasi sendiri ialah menghadirkan kehidupan rakyat yang sejahterah, adil, dan Makmur. Konsep tersebut lebih mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Selain itu, tujuan demokrasi juga terdapat sebagai berikut:

1. *Kebebasan Berpendapat*, seperti yang dibilang oleh Aristoteles bahwa demokrasi merupakan system kebebasan yang dimiliki oleh rakyat. Maka dari tujuan kebebasan berpendapat dalam demokrasi merupakan sebuah tanggungjawab moral bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya system kenegaraan.
2. *Menciptakan Keamanan dan Ketertiban*, demokrasi pada hal ini hadir untuk menjadi tameng terdepan untuk masyarakat. Karena apabila terdapat sebuah permasalahan yang hadir system demokrasi mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.
3. *Mendorong Masyarakat Aktif Dalam Pemerintahan*, dalam hal ini dimana rakyat harus akti dalam berjalannya sebuah pemerintahan. Karena Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.
4. *Membatasi Kekuasaan Pemerintahan*, pada hal ini dikarenakan dalam system demokrasi kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Maka dari itu adanya

pembatasan kekuasaan dalam system demokrasi untuk mencegah hadirnya kekuasaan yang absolut maupun kekuasaan yang dictator.

5. *Mencegah Perselisihan*, yang dimaksud dalam hal ini demokrasi lebih mengedepankan nilai-nilai musyawarah. Karena tentu dalam penyampaian pendapat terdapat banyaknya gagasan-gagasan yang berbeda-beda. Maka dari itu nilai dari musyawarah dalam demokrasi sangat penting untuk meleraikan suatu dinamika yang terjadi.

Sementara itu, terdapat dalam system demokrasi semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga, dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Kemudian system demokrasi di setiap negara tentu berbeda-beda, sebelum kita masuk ke dalam system demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Maka langkah baiknya kita pahami terlebih dahulu macam-macam system demokrasi sebagai berikut:

1. *Demokrasi Parlementer*, merupakan system demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen.
2. *Demokrasi Langsung*, merupakan system demokrasi yang dimana rakyat tidak memiliki representasinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam system ini, rakyat memiliki peran yang sangat penting.
3. *Demokrasi Tidak Langsung*, dalam system ini dimana rakyat dipaksa untuk memiliki representasinya di tingkat parlemen.

4. *Demokrasi Pancasila*, dalam system demokrasi ini dimana bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila.
5. *Demokrasi Presidensial*, pada system demokrasi presidensial dimana pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap kepada legislatif, tetapi, tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya.
6. *Demokrasi Liberal*, merupakan system demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional.³

Kemudian apabila kita lihat, di Indonesia dalam perkembangan demokrasinya mengalami dinamika yang cukup Panjang. Permasalahan dalam demokrasi yang dijalani Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini ialah masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina kehidupan social dan politik yang demokratis.⁴

Dalam historis perkembangan demokrasi di Indonesia seringkali berganti-ganti jenisnya. Pada hal tersebut Indonesia telah empat kali mengganti system demokrasi, system demokrasi masa kemasa yang digunakan Indonesia sebagai berikut:

1. Masa 1945-1959 (Demokrasi Parlementer)
2. Masa 1959-1965 (Demokrasi Presidensial)
3. Masa 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)
4. Masa 1998-Saat ini (Demokrasi Tidak Langsung)

³ Ahmad, "Demokrasi", <https://www.gamedia.com/literasi/demokrasi/>, 4/08/2022, Pukul: 02.15 WIB.

⁴ Miriam Budiardjo, op. cit, Hal. 127.

Apabila kita refleksikan dengan ciri-ciri system demokrasi, terdapat wajibnya sebuah negara untuk melakukan pemilihan umum. Karena di dalam system demokrasi pemilu merupakan pesta yang harus diikuti oleh seluruh rakyat. Sebab dalam kontestasi pemilu, rakyat dapat berpartisipasi sebagai peserta ataupun pemilih. Selain itu, Pemilu merupakan sebuah bentuk upaya nyata dari demokrasi procedural, walaupun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum.

Namun, pemilihan umum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam demokrasi, karena pada penyelenggaraannya harus dilakukan secara demokratis. Kemudian pada hal tersebut, setiap negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai sebuah tradisi dalam memilih legislative dan eksekutif.⁵ Sementara itu, dalam semua system demokrasi modern melakukan pemilihan umum. Namun, tidak semua negara dapat menjalankan pemilu secara demokratis.

Karena pemilihan yang demokratis tidak sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah. Menurut **Adam Pzeworski** (1988), ada dua variable yang dimana menjadi unsur terpenting dalam negara demokrasi. Yang *Pertama*, menurutnya pemilu merupakan sebuah mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai.

Dalam hal tersebut, memiliki makna bahwa legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. Yang *Kedua*, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik.

⁵ Sayap Bening, "Pengertian Pemilu" <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu>, 4/08/2022, Pukul: 04.15 WIB.

Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Selain itu juga, menurut **Harmaily Ibrahim** pemilu merupakan sebuah ruang untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan perwakilan rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan ruang kompetisi untuk menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.

Sementara itu, di Indonesia dalam menerapkan system pemilu yang demokratis tentu harus memiliki team support. Karena dalam menjalani pemilu yang demokratis, bukan tugas Lembaga yang bersangkutan saja. Tetapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk menjalankan pemilu yang demokratis. Biasanya di Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang demokratis, tentu selalu ada peran dari organisasi kemasyarakatan untuk membantu berjalannya pemilu.

Peran yang dilakukan organisasi kemasyarakatan ini bukan dalam hal penyelenggaraan pemilunya, akan tetapi organisasi kemasyarakatan sering berkontribusi untuk membantu dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seberapa penting diselenggarakannya pemilu. Maka dari itu, organisasi kemasyarakatan seringkali menjadi by support team bagi Lembaga penyelenggara pemilu.

Namun seiring berjalannya waktu, organisasi kemasyarakatan seringkali dijadikan alat oleh para calon kontestan untuk membantu memenangkan pemilihan umum. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dengan banyak dinamika politik yang berjalan di Indonesia dapat menimbulkan sebuah upaya-upaya dari kontestan untuk meraih suara dengan hal tersebut. Terutama di Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan yang banyak, dimulai dari organisasi keagamaan, social, dan anak muda.

Akan tetapi disini penulis hanya berfokus pada organisasi keagamaannya saja, karena apabila kita lihat aliran pemikiran politik Indonesia terdapat 5 aliran. Dimana aliran tersebut ialah: islam modern, islam tradisional, nasionalisme, komunisme, dan sosialis demokratik.⁶ Sementara itu, pemikiran politik kotemporer Indonesia yang masih sangat terus terjaga salah satunya ialah pemikiran politik dari kaum islam.

Pada aliran politik islam di Indonesia terdapat dua poroos besar, yaitu: NU dan Muhamadiyah. Namun, dalam pembahasan kali ini penulis hanya berfokus di organisasi kemasyarakatan agama yaitu NU. Secara historisnya NU lahir pada tahun 1926, pada awal dilahirkannya NU dikarenakan terdapat keresahan para ulama terhadap penghapusan kearifan lokal dalam keberagaman masyarakat.

Tidak hanya itu saja, lahirnya NU merupakan sebuah bentuk kesadaran para alim ulama di nusantara terhadap politik. Karena NU merupakan organisasi keagamaan yang memiliki peran untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.⁷ Di lain hal itu, NU juga merupakan satu-satunya organisasi keagamaan yang menjadi pembuka bagi bersemainya pandangan tentang negara nasional. Berbeda dengan organisasi keagamaan yang lain, dimana terdapat keinginan untuk islam menjadi sebuah dasar negara.

Sementara itu, dalam perpolitikan di Indonesia NU memiliki kiprah yang sangat dahsyat. Hal tersebut dikarenakan NU tidak hanya berbicara tentang keagamaan, tetapi NU seringkali berbicara tentang kenegaraan dan budaya. Karena hal tersebutlah yang membuat NU menjadi

⁶ Herbert Feith and Lance Castles, eds. *“Indonesian Political Thinking 1945-1965”*. (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970), Hal. 14.

⁷ A. Khamami Zada, *Nahdlatul Ulama: “Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan”* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hal.9

‘kiblat’ dalam ajang kontestasi pemilihan umum baik dalam skala nasional maupun daerah NU atas partai politik menjadi perhatian utama oleh banyak kalangan.

Dari argument yang diatas, apabila kita Tarik bahwa NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang harus dapat diperhitungkan. Karena NU memiliki modal yang sangat mahal dalam politik, hal tersebut karena NU yang memiliki modal massa yang berlimpah sekaligus solid serta Basis massa *nahdliyyin* ini menjadi semacam “senjata” yang dimiliki NU. Nilai jual yang dimiliki NU dalam politik ini tentu saja memiliki pengaruh dari para kyai yang memiliki legitimasi tinggi atau dipercayai oleh masyarakat nahdliyyin.

Hal tersebut yang membuat NU menjadi organisasi keagamaan yang wajib diperhitungkan dalam kegiatan pesta demokrasi di Indonesia. Pada hal ini, dimana kyai sebagai figure yang memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih baik dibanding masyarakat pada umumnya. Kiai juga mempunyai posisi strategis dalam strata sosial masyarakat.⁸ Selain itu Kiai merupakan salah satu figur atau tokoh agama Islam yang membawa peran dalam bidang sosial keagamaan dan politik terutama pada masyarakat desa (Turmudi 2003:13).

Oleh karena itu, suara kyai menjadi perebutan disetiap pemilu. Posisi kyai pada konstelasi politik di Indonesia saat ini sangatlah strategis dan mahal. Hal itu dikarenakan pada umumnya Kiai yang notabene adalah tokoh agama tidak hanya berfungsi pada sosial keagamaan di masyarakat desa akan tetapi juga bermain pada tataran politik terutama dalam pelaksanaan pemilu (Ummatin 2002:45).

Di Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018, terdapat 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada pasangan pertama terdapat nama Fitri Putra Nugraha dan R Bayu Syahjohan, pada pasangan ini diusung oleh Partai PDI-P dan Hanura dengan memperoleh suara sebanyak

⁸ Abdul Haris, Abdulloh Dardum, “KIAI NU DAN POLITIK (KETERLIBATAN KIAI NU JEMBER DALAM KONTESTASI PILPRES 2019)” *Fenomena*, Vol.20 No.1 (Januari-Juni 2021), Hal. 93

177.153 suara. Sedangkan pada pasangan calonurut dua terdapat nama Ade Munawaroh Yasin dan Iwan Setiawan, pada pasangan ini diusung oleh Partai PKB, PPP, dan Gerindra dengan memperoleh suara sebanyak 912.221.

Pada pasangan calonurut ketiga terdapat nama Ade Ruhandi dan Inggrid Kansil, pada pasangan calon ini diusung oleh Partai PKS, PAN, Golkar, Demokrat, NasDem. Perolehan suara yang di dapat pada pasangan urut ketika ialah sebanyak 859.444. Sedangkan pada pasangan calonurut keempat terdapat nama Gunawan Hasan dan Vicky Irama, pada pasangan calonurut keempat ini tidak diusung oleh Partai Politik atau bisa dibilang pasangan ini menjadi salah satu dari pasangan independent dalam konstestasi Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018. Suara yang diperoleh pasangan ini dapat dibilang paling rendah dengan suara sebanyak 100.745 suara.

Sedangkan pada pasangan calonurut kelima terdapat nama Ade Wardhana Adinata dan Asep Ruhiyat, pasangan ini juga merupakan calon independent pada pilkada kabupaten Bogor tahun 2018. Suara yang diperoleh pasangan ini sebanyak 168.733 suara. Berdasarkan hasil pilkada kabupaten Bogor tahun 2018 dimenangkan oleh pasangan Ade Munawaroh Yasin dan Iwan Setiawan dengan perolehan suara sebanyak 912.221 suara.

Apabila kita Analisa pada hasil pilkada kabupaten Bogor tahun 2018, dimana partai yang mengusung Ade Yasin dan Iwan Setiawan terdapat dua partai politik yang berhaluan agama yaitu: PKB dan PPP. Berdasarkan hasil Pemilu 2014 kemarin, kedua partai tersebut dapat dibilang bukan termasuk ke dalam Partai pemenang.

Karena pada PKB sendiri di Pemilu 2014 kemarin hanya mendapatkan 3 kursi di DPRD Kabupaten Bogor. Sedangkan PPP dalam Pemilu 2014 kemarin mendapatkan posisi kedua dengan jumlah 7 kursi di DPRD Kabupaten Bogor dan Partai Gerindra sebagai partai yang

berhaluan nasionalis hanya mendapatkan 6 jumlah kursi DPRD Kabupaten Bogor di Pemilu 2014.

Hal tersebut dapat dibilang, bahwa Ade Yasin dan Iwan Setiawan yang hanya diusung oleh 3 Partai politik dapat meraih suara yang signifikan. Berbanding kebalik dengan pasangan Ade Ruhandi dan Ingrid Kansil yang dimana diusung oleh 5 Partai Politik dan Partai Politik tersebut memiliki basis suara yang sangat besar. Apabila kita lihat hasil Pemilu 2014 kemarin, Partai Golkar merupakan Partai yang memiliki 9 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, Partai PKS pada Pemilu 2014 kemarin mendapatkan 5 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, kemudian PAN sendiri mendapatkan 3 kursi di DPRD Kabupaten Bogor, Partai Demokrat di Pemilu 2014 mendapat 4 kursi DPRD Kabupaten Bogor, dan NasDem mendapatkan 3 kursi DPRD Kabupaten Bogor di Pemilu 2014.

Dari hasil kursi yang didapat oleh para partai pengusung kedua calon tersebut, secara logika dan basis massa seharusnya pasangan Ade Ruhandi dan Ingrid Kansil mampu memenangkan pilkada kabupaten bogor karena partai pemenang di kabupaten bogor ialah partai Golkar. Namun, dalam kontestasi pilkada calon usungan partai pemenang kalah dengan calon yang diusung partai tidak mendominasi parlemennya.

Walaupun partai pengusung Ade Yasin dan Iwan Setiawan tidak mendominasi parlemen, tetapi Ade Yasin dan Iwan Setiawan mendapatkan dukungan dari para ulama. Kemenangan pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, tidak luput dari background partai islam yang mengusungnya. Partai yang dimaksud ialah Partai PKB dan PPP, dimana kalau kita lihat dan kita Tarik secara ideologi atau pemikiran yang ada bahwa PKB & PPP merupakan partai politik yang berisikan kaum nahdliyyin. Pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan atau yang

disingkat menjadi Hadist, pada pilkada kabupaten Bogor 2018 mendapatkan dukungan penuh dari kelompok agamis.

Dukungan tersebut hadir dari KH Makmur Zawawi yang sebagai pimpinan pondok pesantren Hidayatul Wildan, argument yang diberikan untuk pasangan hadist ialah: “Pasangan inilah yang memiliki integritas daripada pasangan calon yang lain”.⁹ Kemudian selain itu, pasangan Hadist juga memiliki program yang menjadi utama dalam kampanyenya. Program tersebut ialah: “menjadikan kabupaten bogor sebagai gerbang utama ASWAJA” lalu pasangan Hadist juga meminta nasihat para ulama dan habaib dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyusun program pembangunan, mengadakan program Jumat Keliling untuk menyerap aspirasi umat serta mengadakan berbagai kegiatan hari besar Islam secara rutin dan dalam skala besar.¹⁰

Oleh karena itu, pasangan Hadist mendapatkan restu dari peserta Ittihadul Ulama Wal Asatidz (IHLAS) wilayah zona 3 yakni Ciawi, Megamendung dan Cisarua sebanyak 1.500 peserta. Para alim ulama yang mengikuti kegiatan tersebut siap mendukung, karena program kampanye yang disampaikan pasangan Hadist sangatlah realistis. Tidak hanya itu saja, pasangan Hadist juga memiliki program unggulan yang dimana telah disampaikan oleh direktur pemenangan Mas Haris Setiawan. Program unggulan pasangan Hadist ialah: bogor membangun, bogor cerdas, bogor sehat, bogor maju, bogor beradap.

Seorang pakar politik, Maswadi Rauf, memberikan penjelasan bahwa objek dalam kajian ilmu politik merupakan kumpulan pesan yang tersampaikan dengan menggunakan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikasi dan berkedudukan sebagai aktor

⁹ Bilal Ramadhan, “Dukungan Ulama untuk Pasangan Hadist di Pilbup Bogor” <https://www.republika.co.id/berita/panvwu330/network>, 05/08/2022, Pukul: 23.20 WIB.

¹⁰ Bogor Kita, “Dinilai Pro Umat, Hadist Didukung Oleh Ribuan Kyai dan Ustadz” <https://bogor-kita.com/dinilai-pro-umat-hadist-didukung-ribuan-kyai-dan-ustadz/>, 05/08/2022, Pukul: 23.35 WIB.

politik.¹¹ Namun dalam argument yang diberikan oleh pakar politik pak Maswadi Rauf, pada konstestasi Pilkada di Kabupaten Bogor Ade Yasin merupakan ketua DPW PPP di Jawa Barat.

Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang kemenangan yang di raih oleh pasangan HADIST pada Pilkada kabupaten Bogor tahun 2018. Karena apabila kita lihat dari latarbelakangnya Ade Yasin sudah memiliki modal yang sangat diperlukan yaitu popularitasnya sebagai ketua DPW PPP Jawa Barat. Namun, popularitas yang dimilikinya menurut penulis bukan modal untuk memenangi kontestasi pilkada kabupaten Bogor.

Penulis melihat bahwa ada peran dari kyai Nahdlatul Ulama dalam memobilisasi massa untuk mendukung pasangan Hadist. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “PERAN KYAINAHDLATUL ULAMA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 STUDY KASUS: “PEMENANGAN ADE YASIN DAN IWAN SETIAWAN (HADIST)” di seminar proposal yang penulis buat.

1.2. Rumusan Masalah

Pada pembahasan di latarbelakang, dimana penulis menjelaskan secara konkret tentang Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Bogor Tahun 2018. Dimana penulis membahas tentang kemenangan dari Pasangan calon yaitu pasangan Hadist, pada kontestasi pilkada kabupaten Bogor pasangan memiliki suara sebanyak 912.221 suara. Kemudian Ade Yasin secara backgroundnya merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat, selain itu juga Ade Yasin merupakan adik kandung dari mantan Bupati Kabupaten Bogor yaitu Rahmat Yasin. Di penelitian kali ini penulis merasa bahwa apa yang sudah menjadi modal bagi pasangan Hadist miliki secara background, itu kurang cukup untuk memastikan menjadi pemenang di Pilkada.

¹¹ Thomas Tokan, 2016, Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan, PT Gramedia Pustaka Utama, Hal. 3

Maka dari itu penulis mengangkat judul tentang “PERANKYAINAHDLATUL ULAMA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 STUDY KASUS: “PEMENANGAN ADE YASIN DAN IWAN SETIAWAN (HADIST)” di seminar proposal yang penulis buat. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah yang diangkat penulis ialah: “**Apa Yang Menjadi Faktor Utama Para Kyai NU Mendukung Pasangan Hadist Dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2018?**”

1.3. Tujuan Penelitian

Pada kali ini, penulis berkesempatan untuk ingin mengetahui bagaimana peran kyai NU dalam kemenangan pasangan Hadist di kontestasi pilkada kabupaten Bogor. Karena secara backgroundnya Ade Yasin merupakan Ketua DPW PPP Jawa Barat, selain itu juga Ade Yasin merupakan adik kandung dari mantan Bupati Kabupaten Bogor yaitu Rahmat Yasin. Kemudian penulis ingin mengetahui mengapa para kyai nu di kabupaten bogor siap membantu kemenangan pasangan Hadist ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian kali ini, terdapat Ada 2 kegunaan yang bisa didapatkan oleh penulis, yaitu:

- Kegunaan Akademis, secara tertulis peneliti berharap mendapatkan kebermanfaatan dalam pengalaman secara ilmu di Prodi Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. Secara teoritis tentu peneliti ingin bisa mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah di Jurusan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta dan dapat digunakan sebagai suatu bekal ketika bekerja
- Kegunaan Praktis, tentu hal ini sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan nilai mata kuliah seminar politik di Program Studi Ilmu Politik. Kegunaan praktis lainnya ialah

sebagai salah satu ide bagi diri sendiri atau orang lain ketika ingin maju dalam pemilihan umum serentak.

1.5.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang sudah diangkat dengan berjudul “PERAN KYAI NAHDLATUL ULAMA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 STUDY KASUS: “PEMENANGAN ADE YASIN DAN IWAN SETIAWAN (HADIST)” untuk selanjutnya penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi dasar pikiran untuk membuat pertanyaan untuk mengetahui peran kyai NU dalam kontestasi pilkada kabupaten bogor. Terutama peran kyai dalam memobilisasi massa untuk memenangkan pasangan Hadist.

- **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini akan menjelaskan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan topik penulis. Kemudian akan menjelaskan dari konsep yang berkaitan dengan topik mengenai peran kyai NU sebagai elite politik serta sebagai alat pemenangan Di bab ini penulis memasukan tinjauan pustaka terdahulu secara singkat sesuai dengan fenomena yang berkaitan.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan secara sederhana mengenai pendekatan kualitatif yang akan digunakan, jenis penelitian, pengumpulan data sebagai pisau analisis ketika turun

lapangan. Kemudian menjelaskan teknis yang dilakukan ketika melakukan analisis terhadap data yang nantinya dikumpulkan.

- **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Pada Bab ini, dimana penulis menjabarkan ataupun mendeskripsikan mengenai Nahdhatul Ulama, mulai dari historisnya sampai perjalanan hingga lika-liku organisasi serta perannya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian juga, penulis pada bab ini mendeskripsikan tentang peran para ulama dalam kontestasi politik di Indonesia.

- **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab kali ini, dimana penulis menjelaskan serta menyertakan hasil penelitian penulis secara konkret mengenai peran para kyai NU dalam kontestasi PILKADA Kabupaten Bogor Tahun 2018. Kemudian di lain hal, penulis juga tidak lupa untuk menganalisa hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

- **BAB VI KESIMPULAN**

